  

# Logo SKALA Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia - IndonesiaApa Itu Program

**?**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

****

 

****

**BAPPENAS**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

****



****

 

SKALA merupakan Program Kemitraan Australia‑Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

**December 2024**

Program SKALA berupaya memperkuat manajemen keuangan publik agar alokasi sumber daya fiskal lebih merata, berkelanjutan, dan didukung oleh data yang lebih berkualitas serta sistem yang mendorong proses pengambilan keputusan berbasis informasi.

Program SKALA memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung dan mendorong kemitraan lintas sektor untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar dalam hal desentralisasi.

Program ini menekankan pentingnya kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan inklusi kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

Program SKALA juga memanfaatkan hasil dan pembelajaran dari dukungan Kemitraan Australia‑ Indonesia untuk program desentralisasi sebelumnya di Indonesia.

# Wilayah Kerja Kami

# Peta Indonesia berwarna abu-abu dan hijau yang menunjukan wilayah kerja SKALA diantaranya: Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Tanah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

# Tujuan Kami

Membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, sepuluh provinsi, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dan universitas.

**Mitra Kami**

# Periode Program

* Periode program SKALA akan berlangsung selama delapan tahun yang terbagi dalam dua fase (2022‑2026 & 2027‑2030).
* Dimulai pada November 2022 dengan anggaran mencapai AUD 160 juta.
* Perjanjian Subsider (*Subsidiary Agreement*) Program SKALA ditandatangani pada Bulan Maret 2024

November 2022

Januari 2027

September

2030

Fase 1: Januari 2023 ‑ Desember 2026

Fase 2: Januari 2027 ‑ September 2030

4 Tahun

# Pendekatan Kami

Program SKALA berfokus pada penguatan sistem tata kelola, meliputi perencanaan, penganggaran, dan administrasi, yang menjadi landasan penyediaan layanan yang efektif. Dengan mengatasi tantangan sistemik dan meningkatkan proses tata kelola pemerintahan, Program SKALA bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan penyediaan layanan dasar yang inklusif, sehingga sumber daya publik dapat lebih efektif menjangkau kelompok miskin dan rentan. Program SKALA diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama yaitu Praktek, Pembelajaran, dan Pengaruh (3P).

# Fokus Kami

3 Tahun 9 Bulan

Praktek

Mereplikasi dan memperluas berbagai praktik baik

Pembelajaran

Meningkatkan pembelajaran yang efektif dan manajemen yang adaptif

Pengaruh

Advokasi dan memperkuat pengaruh para pemangku kepentingan

**1**

**2**

**3**

**4**

Data dan Analitik

Ketersediaan dan pemanfaatan data terkait kelompok rentan dan kebutuhan layanan dasar mereka, serta penguatan interoperabilitas sistem informasi pemerintah untuk mendukung analisis dan perencanaan yang

Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Standar Pelayanan Minimum

Kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyediakan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif.

Manajemen Keuangan Publik

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan layanan yang inklusif.

**Capaian Program**

## Capaian Akhir 1:

Kondisi Pemampu yang Lebih Kuat bagi Penyediaan Layanan Dasar di Daerah

## Capaian Antara

IO1: Kementerian/lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

IO2: Kementerian/lembaga menggunakan bukti/data dalam memperkuat perencanaan, koordinasi, dan penentuan prioritas desentralisasi.

IO3: Kementerian/lembaga meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti terkait GEDSI dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

## Capaian Akhir 2:

Penyediaan Layanan Dasar yang Lebih Baik di Daerah

## Capaian Antara

IO4: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

IO5: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran memperkuat pemanfaatan bukti/data mengenai kebutuhan layanan dasar dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan perencaan dan penganggaran.

IO6: Pejabat kunci di provinsi dan kabupaten sasaran makin memahami, mampu mengukur dan merencanakan penyediaan layanan dasar yang sesuai kebutuhan seluruh masyarakat.

## Capaian Akhir 3:

Partisipasi, Representasi dan Pengaruh yang Lebih Kuat dari Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya

## Capaian Antara

Io7: Memperkuat pemerintah dalam pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.

IO8: Meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya dan/atau perwakilannya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.

IO9: Sistem informasi di daerah menghasilkan analisis yang lebih akurat tentang kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sehingga memastikan penyediaan layanan dasar yang lebih inklusif.

# Tata Kelola Program

Program SKALA dikelola oleh Komite Pengarah yang diketuai bersama oleh Bappenas (Pemerintah Indonesia) dan DFAT (Pemerintah Australia). Kelompok kerja teknis melibatkan 25 direktorat di tiga kementerian (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan) untuk memastikan implementasi program berjalan secara berkesinambungan dan selaras dengan sistem pemerintahan. Komite Program Provinsi , yang diwakili oleh sepuluh provinsi mitra, bertugas memastikan bahwa rencana dan kebutuhan daerah terintegrasi dalam pelaksanaan program.

**Direktorat Teknis**

**Mitra Kementerian/Lembaga**

**Kementerian**

**Kedeputian/Direktorat Jenderal**

**BAPPENAS**

**KEMENKEU**

**KEMENDAGRI**

Kedeputian Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

Kedeputian Bidang Pembangunan Regional

Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Otonomi Daerah

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan

Direktorat Ketenagakerjaan

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Direktorat Regional I

Direktorat Regional II Direktorat Regional III

Direktorat Pembangunan Daerah

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Dana Transfer Umum Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan

Keistimewaan

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Pusat Fasilitasi Kerjasama Pusat Data dan Informasi Inspektorat II

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Pendapatan Daerah

Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

**Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar**

**Kemitraan Australia ‑ Indonesia**

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22‑23 Jakarta 12920

skala.or.id communications@skala.or.id